



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;
- d. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian yang langsung ditujukan ke SKPD dalam bentuk tugas pembantuan.



Program / Kegiatan, Instansi pemberi tugas pembantuan, lokasi kegiatan, jumlah anggaran serta realisasinya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Pemukiman

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi	:	15 Kecamatan
Anggaran	:	Rp. 29.735.000.000,00
Realisasi	:	Rp. 29.735.000.000,00
SKPD yang melaksanakan	:	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan	:	PNPM Mandiri Perkotaan

2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Dalam Negeri
Lokasi	:	3 Kecamatan
Anggaran	:	Rp. 3.700.951.000,00
Realisasi	:	Rp. 3.677.655.800,00
SKPD yang melaksanakan	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan	:	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM)



3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Kesehatan
Pembantuan
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo
Anggaran : Rp. 2.409.900.000,00
Realisasi : Rp. 2.267.631.750,00
SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo
Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)

4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Kelautan dan
Pembantuan Perikanan
Lokasi : Kabupaten Sidoarjo
Anggaran : Rp. 800.000.000,00
Realisasi : Rp. 648.538.800,00
SKPD yang melaksanakan : Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sidoarjo
Kegiatan : 1. Pengembangan sistem
kehatan ikan dan lingkungan
Anggaran : Rp. 38.780.000,00
Realisasi : Rp. 16.377.000,00
2. Pengembangan sistem
prasarana dan sarana
pembudidayaan ikan
Anggaran : Rp. 65.295.000,00
Realisasi : Rp. 2.155.000,00



3. Pengembangan sistem produksi
pembudidayaan ikan

Anggaran : Rp. 603.250.000,00

Realisasi : 570.000.000,00

4. Peningkatan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya

Anggaran : Rp. 92.675.000,00

Realisasi : Rp. 60.006.800,00

5 Program Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin (APBN)

Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Sosial

Pembantuan

Lokasi : Kabupaten Sidoarjo

Anggaran : Rp. 22.493.664.000,00

Realisasi : Rp. 22.493.664.000,00

SKPD yang melaksanakan : Bagian Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan Setda Kabupaten
Sidoarjo

Kegiatan : Penyaluran dan Pelaksanaan
Raskin



3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tugas pembantuan.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Selama tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan. Kalaupun ada yang diberikan baru berbentuk bantuan stimulan pembangunan Desa dan Kelurahan. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.